

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERSPEKTIF FIQH

Oleh: Sadari

Abstract: Keadilan sangat sulit diperoleh bagi perempuan, terbukti dengan maraknya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Keadilan disimbolkan dengan Dewi Themis, yang notabene adalah perempuan. Dewi Themis digambarkan mengenakan tutup mata, memegang timbangan, dan membawa pedang bermata dua untuk menjamin kekuatan pertimbangan dan keadilan. Tutup mata yang dikenakan Dewi Themis manandakan agar keadilan dapat diberikan secara objektif tanpa pandang bulu. Namun sepertinya tutup mata ini menjadi hambatan bagi Sang Dewi Themis akhirnya tidak dapat melihat bahwa timbangan yang di bawahnya tidak seimbang. Tutup mata itu membuat Dewi Themis tidak mampu melihat bahwa pedang bermata dua yang dibawanya malah membuat korban kembali, menjadi korban karena tertusuk oleh sisi mata pedang yang terarah kepadanya. Akhirnya dengan tutup mata itu, Dewi Themis tidak mampu lagi melihat kebenaran untuk dapat memberikan keadilan pada pihak yang berhak menerimanya. Apakah fiqh termasuk seperti Dewi Themis tersebut yang sudah tertutup matanya sehingga sudah tidak bisa lagi melihat realitas kebenaran dan keadilan di depannya, sehingga dengan dawuhnya mensubordinatkan nilai keadilan bagi perempuan. Padahal pencarian keadilan merupakan salah satu fitrah kemanusiaan, yang harus tetap ditegakkan sebagaimana firman Allah Q.S. al-Maidah (5) : 8 *“I’dilû, huwa aqrabu littaqwâ”* yang artinya *“berbuat adillah, hal itu lebih mendekatkan ke takwa”*, begitupun menurut ahli filsafat zaman Romawi kuno, M.Tullius Cicero (106-43 SM) yang terkenal *“Fiat Justitia Fereat Mundus”* yang artinya *“laksanakan keadilan walaupun langit akan runtuh”*

Kata kunci : Fiqh, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Keadilan Perempuan

PENDAHULUAN

Menurut bahasa fiqh berasal dari *f-q-h*, yang berarti faham atau tahu. Ibn Manzhur dalam Lisan al-‘Arab menyatakan bahwa kata *al-fiqhu* berarti pengetahuan terhadap sesuatu atau pemahaman terhadap sesuatu, kemudian menjadi istilah khusus untuk ilmu-ilmu keagamaan, dan lebih khusus lagi untuk ilmu-ilmu hukum yang terkait dengan kasus-kasus parsial.¹ Secara terminologis, fiqh didefinisikan dengan berbagai ungkapan dan pernyataan.

Tetapi secara umum definisi ini menyangkut empat kata kunci yang menjadi dasar, yaitu ; ilmu, hukum syariah, perbuatan manusia, hasil ijtihad dari dalil tafshili. Diantara definisi fiqh yang bisa dianggap representatif adalah : “ *ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syari’at menyangkut perbuatan-perbuatan manusia, yang dipahami dari teks-teks syar’i yang kasuistis (tafshili)*”.²

Ketika kita berbicara tentang fiqh, maka sebenarnya adalah hukum Islam. Sehingga dapat diuraikan bahwa hukum Islam adalah pemahaman yang diperoleh seseorang dari suatu dalil, ayat, nash al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad. Contohnya hukum Islam di Indonesia, sudah diamalkan oleh umat Islam Indonesia sejak orang Indonesia memeluk agama Islam. Namun, tingkat pengalaman hukum dan tingkat keimanan setiap orang Islam sangat bertingkat, sehingga ditemukan pengalaman hukum itu bervariasi pada setiap suku dan tempat. Kompilasi Hukum Islam (KHI)³ adalah puncak pemikiran fiqh di Indonesia. Hal dimaksud, didasari oleh keterlibatan para ulama, cendekiawan tokoh masyarakat (tokoh agama dan tokoh adat) dalam menentukan hukum Islam dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf.

¹ Ibn Manzur, (tt : juz XII,), hlm.522.

² Muhammad ad-Dasuqi dan Aminah al-Jabir, 1990., hlm.13-22.

³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaksud, secara formal disahkan oleh Presiden tanggal 10 Juni 1991 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Intrukis dimaksud ditindaklanjuti tanggal 22 Juli 1991 oleh Menteri Agama RI melalui keputusannya Nomor 154 Tahun 1991, kemudian disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991. Oleh karena itu, patut dianggap sebagai ijma’ atau ijtihad kolektif masyarakat Indonesia atau fiqh ala Indonesia – meminjam istilah Hajairin. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai ijma’ ulama Indonesia diakui kebenarannya dan diharapkan dijadikan pedoman hukum oleh umat Islam Indonesia dalam menjawab setiap persoalan hukum yang muncul baik penyelesaian kasus sengketa setiap persoalan hukum yang muncul baik penyelesaian kasus sengketa melalui musyawarah di dalam masyarakat maupun melalui lembaga di Peradilan Agama

Kegelisahan dalam tulisan ini adalah terletak pada banyak serangkaian bentuk *anomali*⁴ dan *krisis*⁵ dalam fiqh (hukum Islam). Untuk itu dalam tulisan ini sangat mendukung pentingnya bentukan paradigma fiqh baru untuk menanggulangi krisis dalam hukum Islam terkini, khususnya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Realitas dunia muslim terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) memang dalam beberapa dekade mengalami bentuk persoalan yang amat rumit dan kompleks. Fiqh seolah tidak lagi relevan untuk diterapkan di dunia modern. Fenomena *irrelevansi* fiqh ini tentu saja menggelisahkan para pakar hukum dan pemikir hukum Islam. Salah satu contoh bentuk fiqh yang mengalami *irrelevansi* hukum adalah dalam persoalan hukum keluarga Islam, persoalan tersebut di Indonesia yang sampai saat ini masih di perdebatkan, yakni dalam persoalan Rancangan Undang-undang nikah siri.⁶

Ketika keinginan pemerintah untuk memberikan fatwa hukum yang tegas terhadap pernikahan tersebut, yang dituangkan dalam rancangan undang-undang tentang perkawinan dengan dasar untuk melindungi perempuan dan anak-anak yang selama ini mengalami tindak kekerasan dan diskriminatif atas pemahaman *patriarkhisme* Islam. Hal ini malalah ditentang dan yang terjadi adalah adanya perebutan otoritas ulama dan negara. Keinginan pemerintah menjadi terganjal oleh pemahaman ulama atau pemikiran keagamaan yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang sakral sehingga tidak menerima kritik dan dianggap kebenaran sepihak yang abadi, sehingga sampai sekarang Rancangan Undang-Undang Nikah Siri/Pernikahan Siri atau RUU Hukum Material Peradilan Agama Bidang

⁴ *Anomali* adalah problem-problem ilmiah yang tidak bisa dijawab oleh paradigma lama. Problem-problem itu setelah menumpuk menimbulkan sebuah *krisis* Lihat. Thomas S.Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, (Herndon : The University of Chicago Press, 1970), hlm.65.

⁵ Sedangkan *krisis* itu sendiri adalah suatu fase di mana paradigma lama telah dianggap usang karena begitu banyaknya *anomali-anomali* yang muncul, sedangkan paradigma baru belum terbentuk Lihat. Thomas S.Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, (Herndon : The University of Chicago Press, 1970), hlm.65.

⁶ Poligami, nikah siri, dan kawin kontrak muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Perkawinan sudah diberlakukan sejak 32 tahun lalu, praktik perkawinan yang melanggar undang-undang ini terus saja berlangsung. Bahkan, ada gejala terjadi perebutan otoritas antara ulama dan negara.

Perkawinan memang masih banyak menuai pro dan kontra baik dari masyarakat, pemuka agama hingga tokoh pemerintahan.

Rancangan Undang Undang Nikah Siri ini jika disetujui nantinya memang akan memberikan ancaman hukuman khususnya hukuman pidana sesuai sejumlah Pasal yang terkandung di dalam RUU Pernikahan Siri tersebut. Orang yang melakukan (pelaku) Nikah Siri maupun Pejabat Pencatat Nikah hingga Wali Nikah dalam pernikahan siri akan terancam sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang. Ancaman hukuman pidana bagi pelaku Nikah Siri adalah mulai dari hukuman denda hingga hukuman pidana kurungan penjara.⁷

⁷ Sejumlah *Pasal-Pasal Krusial* yang terkandung dalam *Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Nikah Siri* tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pasal 143

Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama enam bulan.

Pasal 144

Setiap orang yang melakukan perkawinan mut'ah sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya tiga tahun dan perkawinannya batal karena hukum.

Pasal 145

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat 1, didenda paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama enam bulan.

Pasal 146

Setiap orang yang menceraikan istrinya tidak di depan sidang pengadilan sebagaimana dalam pasal 119 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama enam bulan.

Pasal 147

Setiap orang yang melakukan perzinaan dengan seorang perempuan yang belum kawin sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil sedang ia menolak mengawininya dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan.

Pasal 148

Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 149

Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

Pasal 150

Berdasarkan polemik di atas penulis beranggapan bahwa ada benarnya juga bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dipicu oleh legitimasi hukum fiqh, yakni dengan memberikan doktrin, berupa penguatan dalil untuk melakukan tindakan kekerasan. Fiqh yang seharusnya memberikan solusi keadilan, malah mendorong pada bentuk ketidakadilan. Kalau memang fiqh sudah berada pada titik nadir seperti ini, maka pentingnya menahan diri, menjadikan hukum-hukum fiqh sebagai landasan dan argumen atas realitas sosial umat. Karena memang ada dua alasan yang penting mengapa hukum-hukum fiqh, khususnya yang berkaitan dengan kaum perempuan, menjadi bukan landasan yang tepat lagi.⁸

- 1) Dikalangan orang-orang Islam sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang hukum-hukum fiqh tersebut.
- 2) Hukum-hukum fiqh tersebut memuat tanda-tanda sejarah dari zaman di mana ia diciptakan dan masyarakat di mana ia dibentuk. Aturan-aturan ini telah dipalsukan dalam konteks despotisme politik di satu sisi dan otoritas kaum pria di sisi lain. Sebuah kasus yang jelas dan khusus berkenaan dengan perempuan, adalah perkawinan mut'ah (dikalangan syi'ah), sebuah perkawinan yang didasarkan atas kontrak dan temporer, dimana sebagian umat Islam menerima dan sebagian lainnya menolak.

PEMBAHASAN

A. Paradigma Fiqh

Paradigma adalah teori-teori, metode-metode, fakta-fakta, eksperimen-eksperimen yang telah disepakati bersama dan menjadi pegangan bagi aktivitas ilmiah para ilmuwan.⁹ Bidang fiqh mengalami persaingan paradigma (*paradigm war*), yakni pertama dijumpai paradigma *rasionalistik* Hanafi yang kemudian ditolak oleh paradigma *tekstualistik* Maliki.

Setiap orang yang tidak berhak sebagai wali nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun.

Pasal 151

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 143, pasal 145, pasal 146, dan pasal 148 merupakan tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 144, pasal 147, pasal 149, dan pasal 150 adalah tindak pidana kejahatan.

⁸ Muhammad Shahrour, "Islam dan Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing Tahun 1995" dalam Wacana Islam Liberal : *Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu*, Global, ed. Charles Kurzman; Penerjemah, Bahrul Ulum..et.al; Penyunting E.Kusnadinigrat. (Jakarta : Paramadina, 2001), hlm.214.

⁹ Lihat Thoman S.Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, (Herndon : The University of Chicago Press, 1970), hlm. 11, 65.

Kemudian paradigma *tektualistik* Maliki ditolak oleh paradigma *sintesis teks* dan *rasio* Syafi'î. Paradigma *sintesis* Syafi'î ditolak oleh paradigma *tektualistik* Ibn Hazm azh-Zhâhirî.

Paradigma terakhir ini sebentar saja sudah menimbulkan *anomali* dan akhirnya menjadi *krisis*. Akan tetapi ternyata umat Islam kemudian tidak mampu menemukan paradigma baru. Akhirnya, muncul banyak paradigma yang ternyata memiliki komunitasnya sendiri-sendiri. Ada yang kembali menghidupkan paradigma Maliki tapi dengan baju baru yang bernama paradigma fundamentalistik Hanbali, seperti Saudi Arabia. Dan ada juga yang memegang paradigma “gado-gado” alias paradigma *eklektik*. Dalam kasus Indonesia, organisasi sosial Islam tradisional (NU) memakai paradigma Syafi'î, tapi kadang juga memakai paradigma *eklektika* mazhab empat. Sedangkan organisasi Islam pembaru (Muhammadiyah, Persis) memakai paradigma *fundamentalistik* Hanbali, walaupun sering tidak diakuinya, karena mereka tidak sudak bermazhab. Tetapi dalam beberapa kasus, mereka juga menganut paradigma *eklektika* ini.¹⁰

Di sini terlihat bahwa pergeseran paradigma dalam tradisi keilmuan fiqh, berlangsung dengan sangat lamban. Bahkan hingga saat ini, paradigma manakah yang harus dianggap paling kuat, belum bisa ditentukan. Perang paradigma masih terus berlangsung. Waktulah yang akan menentukan pemenangnya. Persoalannya adalah kapan perang paradigma itu berakhir ? apabila umat Islam giat bereksplorasi dan bereksperimentasi dalam bidang fiqh, maka persoalan ini akan cepat dapat diakhiri. Sebaliknya, bila umat Islam malas berfikir, pemikiran fiqh akan tetap mengalami stagnasi dan sulit untuk berkembang.

Terkait dengan bagaimana fiqh melihat kontek permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Maka pertanyaan yang muncul adalah paradigma fiqh model siapakah yang harus disalahkan, ketika secara nyata terbukti bahwa adan produk fiqh yang melegitimasi bentuk kekerasan tersebut ? menurut peneliti tidak harus menyalahkan model fiqh yang telah ada, sebab ijtihað fiqh memang bermanfaat untuk semangat pada zamannya. Yang harus dilakukan sekarang adalah melakukan ijtihað gaya baru terutama dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jenis dan tawaran dari peneliti adalah berupa ijtihað Fiqh Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (FA-KDRT).

¹⁰ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam : Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, cet.ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm.98.

B. Epsitemologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebagaimana disebutkan dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ada banyak faktor sosial, yang melestarikan adanya KDRT dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendampingan dari masyarakat. Diantara faktor-faktor tersebut bisa di akumulasi sebagai berikut:

- 1) Adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan

Adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini, yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran-peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan.

- 2) Ketergantungan isteri terhadap suami penuh

Ketergantungan isteri terhadap suami penuh, terutama untuk masalah ekonomi, yang membuat isteri benar-benar berada dibawah kekuasaan suami. Posisi rentan ini sering menjadi pelampiasan bagi suami, ketika dia menghadapi persoalan-persoalan yang sebenarnya berada diluar rumah tangga. Banyak penelitian yang menunjukkan berapa suami yang mengalami kekerasan atau pelecehan di tempat kerja, dia lalu melampiaskannya di rumah kepada isteri dan anak-anak.

- 3) Sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung mengabaikan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dianggap urusan internal dan hanya menyangkut pihak suami dan isteri belaka. Paling jauh, keluarga terdekat dari pihak suami maupun isteri. Itupun masih sangat jarang. Masyarakat pasti akan bertindak jika melihat ada perempuan yang diserang orang tidak dikenal, tetapi jika yang menyerang adalah suaminya sendiri, justru mereka mendiamkannya. Jika kekerasan suami ini terjadi di luar rumah, masyarakat hanya akan menasehati untuk dibawa kedalam rumah saja.

- 4) Keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat termasuk yang mungkin bersumber dari fiqh Islam dalam hal ini adalah tafsir agama.

Bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga, harus pandai menjaga rahasia keluarga, keyakinan tentang pentingnya keluarga ideal yang penuh dan lengkap, tentang isteri

shalihah, juga kekhawatiran-kekhawatiran terhadap proses perceraian dan akibat dari perceraian. Tentu saja, keyakinan dan keyakinan yang tumbuh di masyarakat ini, pada awalnya adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan keluarga. Tetapi dalam konstruksi relasi yang timpang, seringkali digunakan untuk melanggengkan KDRT. Paling tidak, membuat isteri berpikir seribu kali ketika harus memutuskan untuk mengakhiri KDRT yang menimpa dirinya. Karena seringkali berakibat pada perceraian, atau minimal pengabdian dari suami dan pihak keluarga suami.

5) Mitos tentang KDRT

Masyarakat selama ini mempercayai berbagai mitos seputar terjadinya KDRT. Mitos merupakan suatu cerita dalam sebuah kebudayaan yang dianggap mempunyai kebenaran mengenai sesuatu perkara yang pernah berlaku pada suatu masa dahulu. Ia dianggap sebagai satu keyakinan dan kebenaran mutlak yang dijadikan sebagai rujukan.¹¹ Mitos-mitos ini muncul di dalam masyarakat yang pada akhirnya memojokkan korban dan menjauhkan korban untuk mendapatkan bantuan secara sosial. Berikut tabel mitos dan fakta KDRT.

MITOS DAN FAKTA KDRT¹²

| No | Mitos | | Fakta | |
|----|-------|---|-------|---|
| 1 | X | KDRT jarang terjadi | √ | Satu dari 3 isteri mengalami KDRT |
| 2 | X | KDRT adalah budaya “ barat ” | √ | KDRT terjadi di seluruh belahan dunia |
| 3 | X | KDRT dilakukan orang berpendidikan rendah | √ | Pelaku KDRT juga dari orang berpendidikan tinggi |
| 4 | X | KDRT hanya terjadi pada keluarga miskin | √ | Korban KDRT berasal dari semua golongan |
| 5 | X | KDRT adalah urusan pribadi | √ | KDRT adalah perbuatan kriminal yang jadi tanggungjawab masyarakat |

¹¹ Wikipedia Project, 2007

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama : Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (jakarta : Komnas Perempuan, 2008), hlm. 37.

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| 6 | X | KDRT terjadi karena isteri membangkang | √ | Korban kebanyakan adalah isteri yang penurut |
| 7 | X | Pelaku KDRT mengalami gangguan kejiwaan atau kehilangan kontrol sesaat yang memukul isterinya | √ | Pelaku KDRT adalah mereka yang memiliki gangguan maupun yang tidak, penganiayaan merupakan bentuk kontrol dan penciptaan ketakutan |
| 8 | X | Pelaku KDRT punya perangai kasar terhadap siapaun | √ | Pelaku bisa berbuat baik dan santun pada orang lain, dan dihormati |
| | X | KDRT terjadi pada pasangan yang memulai perkawinan tanpa dasar cinta | √ | KDRT terjadi pada pasangan yang memulai perkawinan atas dasar cinta |
| 9 | X | Seorang isteri dianiaya karena kesalahannya sendiri : keras kepala, cerewet, membantah | √ | Isteri seringkali dipukul karena alasan-alasan diluar kendali mereka dan menurut standar suami. Mereka dipukul karena tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual suami, atau karena tidak dapat membuktikan bahwa mereka tidak berselingkuh. Banyak isteri yang dipukul adalah mereka yang menurut, ta'dzim dan mengalah |
| 10 | X | Hanya lelaki yang gagal di beberapa aspek dalam hidupnya yang memukul isterinya | √ | Seringkali lelaki yang memiliki karir yang baik memukul isterinya. Isteri-isteri ini lebih enggan untuk melaporkan suami |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| | | | | mereka karena merasa harus menjaga reputasi suaminya yang baik yang boleh jadi merupakan satu-satunya sumber ekonomi keluarga |
| 11 | X | Suami yang menganiaya isterinya biasanya karena sedang stres dan mabuk | √ | Suami yang menganiaya isterinya kebanyakan dalam keadaan sadar, tidak mabuk maupun stres |
| 12 | X | Hanya kelompok ekonomi bawah yang menganiaya isterinya | √ | Laki-laki (suami) dari segala tingkat sosial ekonomi berpotensi melakukan penganiayaan |
| 13 | X | Perempuan yang bertahan dalam suasana aniaya oleh suami adalah Masochistis (mereka bertahan karena “menikmati” kekerasan tersebut) | √ | Mereka bertahan karena banyak hal : ketergantungan ekonomi, psikologis, adanya proses isolasi |
| 14 | X | Perempuan yang mengalami penganiayaan selalu bisa meninggalkan situasi tersebut | √ | Perempuan seringkali bertahan dalam situasi kacau tersebut karena mereka merasa bersalah bila meninggalkan rumahnya (ketakutan dan demi anak) |
| 15 | X | Anak-anak membutuhkan kedua orangtuanya sekalipun hubungan yang ada penuh dengan kekerasan | √ | Ada efek jangka panjang yang sangat buruk yang akan dialami anak yang hidup dalam keluarga yang sering terjadi kekerasan di dalamnya |

C. Analisis Keadilan untuk Perempuan dalam Perspektif Hukum Fiqh

Di antara kelompok masyarakat mustadh'afin yang paling beruntung dengan kehadiran Islam adalah kaum perempuan. Dalam Islam, kaum

perempuan dimanusiakan seperti layaknya manusia laki-laki. Praktek pembunuhan bayi perempuan yang lazim terjadi di kalangan jahuliyah dihentikan total. Bahkan al-Qur'an menyebut bayi perempuan yang lahir sebagai berita gembira dari Allah, dan oleh karena itu tidak pantas kehadirannya di sambut dengan rasa malu seperti sebelumnya.¹³

Namun sampai saat ini mengapa Perempuan masih lebih Rentan terhadap Kekerasan, Faktor pemahaman yang timpang terhadap fiqh sebagai hasil produk hukum Islam seakan-akan telah melegitimasi adanya bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Bentuk ketimpangan itu lebih dirasakan oleh perempuan, karena ada perbedaan gender sehingga menimbulkan ketidakadilan. Bentuk ketidakadilan atas perbedaan gender berakibat sampai pada kontruksi sosial yakni laki-laki dan perempuan tidak di posisikan sama dalam masyarakat. Sehingga kita sudah dianggap cukup terlena dan terlanjur percaya anggapan yang salah kaprah bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan.

Dalam rumah tangga hal tersebut terwujud dalam anggapan bahwa perempuan yang sudah bersetatus sebagai istri sepenuhnya telah menjadi milik suami. Jika istri melakukan kesalahan – dalam pandangan suami-seolah-olah menjadi kewajiban suami untuk segera mengingatkannya. Peringatan itu diberikan sebagai bentuk pengajaran suami terhadap istri dalam rangka pembinaan rumah tangga. Namun sayangnya, bentuk-bentuk pengajaran ini kadangkala di dalam masyarakat, terjadinya kasus istri yang ditempeleng, ditampar, atau ditendang oleh suaminya, disamping tindak kekerasan fisik lainnya. Bahkan banyak laki-laki menganggap bahwa memukul istri dibenarkan oleh agama. Ayat yang sering dipakai sebagai dalil adalah :

Kuam laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu, wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu. Janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (Q.S an-nisa'/4:34)

¹³ Q.S. an-Nahl (16) : 58-59

Kekerasan seringkali tidak hanya menimpa fisik para istri akibat ditempeleng, ditampar, dijambak, dipukul, ditendang dan tidak penganiayaan lainnya. Sebab, meskipun istri tidak dipukul, tetapi suami terkadang mengeluarkan kata-kata kotor untuk mengumpat istri. Secara fisik, istri memang tidak terluka, namun perasaannya sebagai manusia tercampakkan, seringkali ucapan kotor itu lebih menyakitkan dari pada memarnya wajah.

Beragam kitab telah melakukan legitimasi dan justifikasi hukum-hukum fiqh berkenaan dengan Perempuan, termasuk kitab-kitab berikut yakni :

- 1) Kitab *Uqud al-Lujain* karya Nawawi
- 2) Kitab *Ihyâ Ulûm ad-Dîn*, karya Abu Hamid al-Ghazali
- 3) Kitab *Az-Zawâzir*, karya Ibn as-Samarqandi
- 4) Kitab *At-Targhîb wa at-Tarhîb*, karya al-Mundzir
- 5) Kitab *Al-Kabâir*, karya adz-Dzahabi
- 6) Kitab *Al-Jami' ash-Shaghîr*, karya Jalaluddin as-Syuyuthi

Dari kitab-kitab tersebut merupakan representasi dari ribuan kitab lainnya, yang ada adalah kesan minor terhadap perempuan baik secara pribadi maupun kolektif, terutama karena sebagian nilai-nilai yang diajarkan dari generasi ke generasi memang memarginalkan perempuan. Di antara sumber nilai yang memarginalkan perempuan tersebut adalah kitab *Uqud al-Lujain*, salah satu khazanah Islam klasik yang dijadikan pedoman dalam membina kehidupan keluarga. Karya Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab itu, menurut peneliti, banyak berisikan statment yang dijadikan legitimasi bagi tindakan yang merendahkan perempuan. Padahal sebagai manusia, perempuan tidak rela direndahkan.

Di bawah ini adalah bentuk analisis perbedaan posisi Perempuan dan laki-laki dalam hukum fiqh yang ditenggarai sebagai pemicu atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam umat Islam pada umum dan umat Islam Indonesia pada khususnya, antar lain :

**PERBEDAAN POSISI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI
DALAM HUKUM FIQH¹⁴**

| No | Bidang hukum fiqh | |
|----|-------------------|-----------|
| | Perempuan | Laki-laki |
| 1 | Aqidah | |

¹⁴ Husein Muhammad, Faqihuddin Abd.Kodir, et al, *Modul Kursus Islam dan Gender : Daurah Fiqh Perempuan*, cet.ke-2, (Cirebon : Fahmina Institute, 2007), hlm.204-209

| | | | |
|---|----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Bayi perempuan cukup disembelihkan dengan satu kambing | <ul style="list-style-type: none"> Bayi laki-laki disembelihkan dua kambing |
| 2 | | Khitan | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Di lakukan dengan memotong sebagian organ (klitoris) yang sangat penting bagi seksualitas perempuan | <ul style="list-style-type: none"> Dilakukan dengan memotong anggota tubuh (kulub) yang tidak diperlukan, yang justru menjadi sebab timbulnya berbagai penyakit |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Hukum khitan perempuan, ada yang mengatakan wajib, ada sunnah dan ada ualama yang sekedar mengatakan sebagai kemuliaan | <ul style="list-style-type: none"> Khitan bagi laki-laki adalah wajib, ada juga ulama yang menyatakan ‘sunnah mu’akkadah’ |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Diantara tujuan khitan perempuan untuk mengurangi nafsu seksualnya, terutama mereka yang tinggal di daerah panas | <ul style="list-style-type: none"> Di antara tujuan utama khitan laki-laki, untuk menambah kenikmatan seksual laki-laki dan menghindarkan dari berbagai penyakit |
| 3 | | Taharah (Bersuci) | |
| | a) | Cara mencuci air kencing bayi | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Yang terkena air kencing bayi perempuan yang belum makan apa-apa kecuali ASI harus dicuci seperti biasa, dibasuh dengan air, (<i>najis mutawassithah</i>) | <ul style="list-style-type: none"> Cukup dengan dipercikkan air saja pada tempat yang terkena najis bayi laki-laki (<i>najis mukhaffafah</i>) |
| | b) | Bersuci dari hadats | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Di samping harus bertaharah karena habis buang hajat dan hubungan intim, juga dari haidh, nifas dan istihadhah | <ul style="list-style-type: none"> Hanya bertaharah dari habis bunag hajat dan hubungan intim, serta keluar air mani |
| 4 | | Shalat | |

| | | | |
|--|----|--|---|
| | a) | Adzan/Iqamah | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Ada penghalang biologis dan periodik yaitu menstruasi | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada penghalang sama sekali |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Hanya disunnahkan Iqamah | <ul style="list-style-type: none"> • Disunnahkan adzan dan Iqamah |
| | b) | Aurat | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan | <ul style="list-style-type: none"> • Hanya tubuh antara pusar dan kedua lutut |
| | c) | Gerakan Shalat | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Ketika ruku dan sujud menekankan siku pada bagian payudara. Ketika sujud menutup selangkangan dengan mempertemukan kedua paha pada perut | <ul style="list-style-type: none"> • Ketika ruku dan sujud disunnahkan merenggangkan kedua lutut dan perut |
| | d) | Berjama'ah | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak boleh mengeraskan suara jika shalat bersama laki-laki | <ul style="list-style-type: none"> • Sunnah mengeraskan suara dalam shalat jahriah (malam hari) |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Suara perempuan adalah aurat | <ul style="list-style-type: none"> • Suara laki-laki bukan aurat |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sunnah, tetapi lebih baik dilakukan di dalam rumah | <ul style="list-style-type: none"> • Sunnah dan lebih baik dilakukan di ruang publik, seperti masjid atau mushalla |
| | e) | Menjadi Iman | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Hanya boleh menjadi Imam bagi perempuan, atau anak laki-laki kecil | <ul style="list-style-type: none"> • Boleh menjadi Imam bagi siapapun |
| | f) | Meningatkan kesalahan Imam | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Jika Imam melakukan kesalahan, perempuan mengingatkannya dengan bertepuk tangan | <ul style="list-style-type: none"> • Mengingatkan Imam dengan mengucapkan Subhanallah |
| | g) | Shalat Jum'at | |

| | | | |
|---|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak wajib bagi perempuan dan tidak masuk dalam hitungan bilangan jama'ah | <ul style="list-style-type: none"> • Wajib bagi laki-laki |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak boleh berkhotbah | <ul style="list-style-type: none"> • Boleh berkhotbah |
| 5 | | Puasa | |
| | a) | Puasa wajib dan Sunnah | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Ada penghalang biologis dan periodik yaitu menstruasi dan nifas, menyusui dan hamil | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada penghalang sama sekali |
| | b) | Puasa Sunnah | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Perlu izin suami | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak perlu izin siapa-siapa |
| 6 | | Jenazah | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Mayit perempuan dibungkus dalam 5 lipatan kain kafan | <ul style="list-style-type: none"> • Mayit laki-laki cukup dibungkus dalam 3 lipatan kain kafan |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Shalat jenazah yang dilakukan perempuan masih belum menggugurkan fardhu kifayah | <ul style="list-style-type: none"> • Sudah menggugurkan fardhu kifayah |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Posisi berdiri Imam ketika mensholati jenazah perempuan adalah di hadapan pantat mayit | <ul style="list-style-type: none"> • Posisi berdiri Imam ketika mensholati mayit laki-laki adalah di samping kepala |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Di sunnahkan memayungi jenazah perempuan yang sedang dikubur | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak disunahkan untuk memayungi ketika jenazah laki-laki sedang dikubur |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak boleh mengangkat jenazah sekalipun mayitnya perempuan | <ul style="list-style-type: none"> • Boleh mengangkat jenazah sekalipun mayitnya perempuan |
| | | | |
| 7 | | Haji | |
| | a) | Safar Haji | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Perlu disertai mahram | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak perlu disertai mahram |
| | b) | Pakaian Ihram | |

| | | | |
|--|-----------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Menutupi seluruh badan, kecuali muka dan kedua telapak tangan | <ul style="list-style-type: none"> • Cukup menutupi antara pusar dan kedua lutut, bahkan dilarang menutup kepada |
| | c) Thawaf | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Jika sedang haidh tidak boleh melakukan thawaf | <ul style="list-style-type: none"> • Bisa leluasa dilakukan kapan saja tanpa ada hambatan sama sekali |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak boleh mencium hajar aswad ketiak thawaf | <ul style="list-style-type: none"> • Sunnah mencium hajar aswad |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Ketika thawaf sebaiknya menjauh dari Ka'bah | <ul style="list-style-type: none"> • Sunnah mendekati Ka'bah (baitullah) |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sebaiknya thawaf dan Sa'i di waktu malam | <ul style="list-style-type: none"> • Sunnah thawaf dan Sa'i di waktu yang afdhal |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak sunnah raml (berjalan agak cepat) ketiak Sa'i | <ul style="list-style-type: none"> • Sunnah berjalan cepat (raml) ketiak Sa'i |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sunnah tidak melantangkan suara ketika takbir 'ied dan talbiyah | <ul style="list-style-type: none"> • Sunnah melantangkan suara dengan takbir dan talbiyah |
| | 8 | Waris | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Ketika sebagai Istri, bagiannya bisa seperempat (yang tanpa anak) atau seperdelapan (yang dengan anak) | <ul style="list-style-type: none"> • Ketika sebagai suami, bagiannya bisa setengah warisan dari siteri (yang tanpa anak) atau seperempat (yang dengan anak) |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai anak, bisa setengah warisan jika tanpa anak laki-laki, atau setengah dari warisan anak laki-laki bersamaan dengan mereka | <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai anak, bisa memperoleh bagian satu banding dua anak perempuan atau menerima seluruh sisa warisan (ashabah) jika tanpa anak perempuan |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga dari garis perempuan disebutkan dengan dzawil arham yang tidak mendapatkan | <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga dari garis laki-laki juga disebut dzawil arham, tetapi dapat memperoleh warisan |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | bagian apapun dari peninggalan mayit | |
| 9 | | Nikah | |
| | | • Dinikahi | • Menikahi |
| | | • Perlu ada wali | • Tidak perlu wali |
| | | • Tidak boleh menikahkan | • Boleh menikahkan |
| | | • Tidak boleh menjadi wali dan menjadi wakil dalam melafalkan ijab dan qabul | • Boleh menjadi wali dan wakil dalam ijab dan qabul |
| | | • Tidak boleh menjadi saksi pernikahan | • Boleh menjadi saksi pada pernikahan |
| | | • Tidak berkewajiban memberi nafkah | • Berkewajiban memberi nafkah |
| | | • Jika istri menolak keinginan suami maka dianggap nusyuz | • Jika suami menolak ajakan isteri tidak dianggap nusyuz, sebagai suami, permintaannya justru tidak boleh ditolak sang isteri, kecuali untuk hal yang ma'siat (melanggar syara') |
| | | • Jika perempuan nusyuz, maka suami boleh memberikan peringatan, meninggalkannya di tempat tidur dan bahkan memukulnya | • Jika suami nusyuz, maka isteri tidak boleh memukulnya, melainkan harus berdamai |
| | | • Perempuan muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki kitabiyah (Yahudi, Nasrani) | • Laki-laki Muslim boleh kawin dengan perempuan kitabiyah (Yahudi, Nashrani) |
| | | • Perempuan tidak memiliki hak menikmati suami. Karena itu, jika suami menolak atau melarang dirinya dinikmati atau auratnya dilihat sekalipun, maka | • Suami memiliki hak 'menikmati' isteri. Ketika isteri menolak atau melarang untuk dinikmati atau dilihat auratnya misalnya, suami tetap berhak dan halal melakukannya |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | isteri tidak diperkenankan menikmati atau melihat | |
| 10 | | Ceraai (Thalak) | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Hanya bisa dengan cara meminta ceraai dari suami dengan bayar tebusan ('iwadh), yaitu yang disebut dengan khulu'. Atau dengan cara tafwidhu at-thalaq atau meminta suami menyerahkan hak thalaknya kepada sang isteri | <ul style="list-style-type: none"> Bisa menjatuhkan ceraai kapan saja, di mana saja, dengan tanpa pertimbangan sekalipun |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Jika berpisah dari suami baik karena diceraai atau ditinggal wafat, harus menunggu masa 'iddah, di amana perempuan tidak diperkenankan untuk menikah atau sekedar dilamar sekalipun | <ul style="list-style-type: none"> Tidak berlaku hukum 'iddah bagi laki-laki, maupun ihdad (berkabung). Sesaat begitu berpisah dari isterinya, baik karena ceraai atau ditinggal wafat, ia bisa langsung menikah tanpa jedah waktu sama sekali |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Isteri tidak memiliki hak rujuk | <ul style="list-style-type: none"> Setelah bercerai, suami diberi iddah, sekalipun isteri setuju |
| 11 | | Pidana (Jinayah) | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Tidak boleh menjadi saksi untuk urusan darah dan pidana, walaupun boleh persaksiannya dianggap $\frac{1}{2}$ banding 1 dengan laki-laki | <ul style="list-style-type: none"> Boleh menjadi saksi untuk urusan apa saja, termasuk darah dan pidana |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Diat karena membunuh perempuan adalah separuh dari diat laki-laki yaitu 50 ekor unta. Diat pelanggaran terhadap anggota bandan | <ul style="list-style-type: none"> Diat laki-laki adalah penuh yairu seratus ekor unta |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | juga separoh dari laki-laki | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan had terhadap perempuan dalam posisi duduk | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan had terhadap laki-laki dalam posisi berdiri |
| 12 | | Qodha' (Peradilan) | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Kesaksian perempuan adalah separuh laki-laki (4 orang) | <ul style="list-style-type: none"> • Sakasi laki-laki cukup dua orang |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Jika menjadi saksi dalam hal finansial, maka harus didampingi laki-laki (dua orang perempuan dan seorang laki-laki) | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak perlu di dampingi perempuan |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Perempuan tidak boleh menjadi qadhi atas hakim | <ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki boleh menjadi hakim |
| 13 | | Jihad | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Secara umum dalam kondisi apapun perempuan tidak wajib jihad-perang, sebab pada umumnya perempuan adalah lemah | <ul style="list-style-type: none"> • Pada kondisi tertentu wajib berjihad-perang sebab pada umumnya laki-laki adalah kuat |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Jika tertangkap dalam peperangan maka langsung menjadi budak | <ul style="list-style-type: none"> • Jika tertangkap dalam peperangan maka ada tiga kemungkinan, sebagai tebjusan, dijadikan budak, atau dibunuh |
| 14 | | Imamah | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak boleh menjadi Imam a'zham (pemimpin tertinggi) atau khalifah | <ul style="list-style-type: none"> • Boleh menjadi Imam a'zham (pemimpin tertinggi) atau khalifah |

Berdasarkan analisis yang dapat peneliti ungkapkan di atas dapat menyimpulkan bahwa perempuan masih dikatakan bersalah ketika mendapatkan permasalahan. Dalam beberapa kitab fiqh ini masih bertendensi perempuan sebagai akar objek penindasan. Sampai pada wilayah dosa pun perempuan yang harus menanggung dosa yang paling besar. Kitab-kitab

tersebut di atas merupakan dari sekian kitab fiqh yang merepresentasikan untuk terus diteliti dalam rangka menciptakan momok baru dan paradigma baru dalam dunia fiqh, sehingga tercipta fiqh yang mengusung keadilan dan menghentikan kekerasan, atau dengan kata lain pengkhususan dalam penelitian ini adalah memproyeksikan ijtihad Fiqh Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (FA-KDRT).

KESIMPULAN

Jika prinsip-prinsip keislaman berupa Fiqh Anti Kekerasan Dalam Keluarga (FA-KDRT) sebagai penegasan pada kemanusiaan, penguatan relasi keadilan dan pemihakan terhadap korban menjadi kesadaran semua pihak, niscaya tidak akan timbul ketidakadilan dan bahkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di muka bumi ini. Tetapi seringkali prinsip ini hanya berhenti pada tataran normatif yakni fiqh yang memihak dan menjustifikasi terhadap ketidakadilan dan kekerasan. Untuk itu perlu ada uji ulang dengan teori *ongoing research* terhadap fiqh tersebut, sehingga fiqh menyatu dengan misi agama yakni menghilangkan segala bentuk kemungkaran dan ketidakadila.

Pada konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kita setidaknya telah memiliki beberapa perangkat hukum positif, yang sekalipun masih ada kekurangan tetapi bisa kita manfaatkan untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan yang mencederai rasa kemanusiaan ini. Ada KUHP, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, UU no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU no. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Kita bersama-sama mendorong agar Undang-undang ini bisa efektif digunakan para penegak hukum untuk menindak segala bentuk ketidakadilan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini secara tegas akan merubah wajah baru fiqh dan menguatkan perangkat undang-undang positif yang sudah ada, dengan cara merealisasikan Fiqh Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (FA-KDRT). Dan secara tegas sedikit banyak akan mempertegas sebuah perlindungan secara normatif akan hak-hak perempuan, sebagai perlindungan terhadap objek, baik secara sadar maupun tidak sadar.

DAFTAR PUSTAKA

‘Abduh, Muhammad, Pandangannya tentang pembaruan ushul fiqh dituangkan dalam buku yang diedit oleh Muhammad ‘Imârah, *al-*

A'Mâl al-Kâmilah li al-Imâm Muhammad 'Abduh. Ed. Muhammad 'Imârah, 6 Vol. (Beirut : Al-Mu'assasah al-'Arabiyyah li ad-Dirâsah wa an-Nasyr, 1972-1974.

A. Abu Sulaiman, Abdul Hamid, *Crisis in The Muslim Mind*, Herdon-Virginia : III T, 1415/1993.

Abdullah, Irwan, et.al, Islam dan Kontruksi Seksualitas, dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Marital Rape, Suatu Keniscayaan ?*. cet. I, Yogyakarta : PSW IAIN Yogyakarta, 2002.

Al-Fâsî, Allal, *Maqâshid ash-Sharî'ah al-Islâmiyyah wa Makârimuhâ*, Casablanca : Maktabah al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1963.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1993.

B.Hallaq, Wael., *A History of Ismlamic Legal Theories : An Introduction to Sunni Ushûl Fiqh*, Cambridge : Cambridge University Press, 1997.

Brown, Harold I, *Perception, Theory and Commitment : The New Philosophy of Science*, Chicago : The University of Chicago Press, 1979.

Delorenza, Yusuf Talal dan Anas S.ash-Shaikh-Ali, *Herdon-Virginial*, III T, 1416/1994.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, cet.II, Jakarta : LSPPA, Yayasan Perkasa, 1994.

Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam : Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, cet.ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Fayumi, Badriyah, Mursyidah Thahir, Anik faridah, Nefisra Viviani, *Keadilan dan Kesetaraan Jender : Perspektif Islam*, cet. Ke-1, Jakarta : Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama RI, 2001.

Garisah, Ali, *Metode Pemikiran Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1989.

Hasyim, Syafiq, *hal-hal yang tak Ter pikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung : Mizan, 2001.

Khallâf, ‘Abduh Wahhâb, Bukunya yang sangat relevan adalah *Mashâdir at-Tasyrî’ fî mâ lâ Nashsh fîh*, Kairo : Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1955.

Kodir, Faqihuddin Abdul, Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama : Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Komnas Perempuan, 2008.

Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler : Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesi*, cet ke-1, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2008.

M.Zein, Satria Effendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer : Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, cet.ke-2, Jakarta : Prenada Media, 2005.

Melchert, Christopher, “Islamic”, 23 Oklahoma City University Law Review 901., 1998

Mernissi, Fatimah, *Wanita dalam Islam*, (penerjemah Yaziar Radianti), Bandung : Pustaka, 1994.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : LKiS, 2001.

Nye, F.Ivan, *Role Structure and Analysis of the Family*, California & London : Sage of Social Research, 1976.

Omar, Mohammed Abdel-Khalek, “Reasoning in Islamic Law : Part One,” (1997) 12 Arab Law Quarterly.

Ridlâ, Rasyîd, *Yusr al-Islâm wa ushûl at-Tasyrî’ al-‘Âm*, (Kairo : Mathba’ah Nahdlah Misr, 1956.

Shahrour, Muhammad, “ Islam dan Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing Tahun 1995” dalam Wacana Islam Liberal : *Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu*, Global, ed. Charles Kurzman; Penerjemah, Bahrul Ulum..et.al; Penyunting E.Kusnadiningrat, Jakarta : Paramadina, 2001.

Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, cet.II, Jakarta : Paramadina, 2001.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, cet.ke-1, Jakarta : Ghalia Indonesia/Anggota IKAPI, 2010.